

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 29 Desember 2014

Subyek : Limbah

Hal : 21

Tambang Batubara

Bekas Galian Berisi Limbah Beracun

SAMARINDA, KOMPAS — Tiga tahun terakhir, lubang bekas galian tambang batubara di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, telah merenggut nyawa sembilan anak. Namun, sekitar 150 lubang bekas tambang batubara yang berisi limbah beracun itu belum ditutup. Proses hukumnya pun seakan mandek, tidak ada kejelasan.

Tewasnya Muhammad Raihan Saputra (10), warga Sempaja Selatan, Samarinda, pekan lalu, karena tercebur ke lubang tambang adalah korban (anak) tewas kesembilan dalam tiga tahun terakhir. Raihan tercebur ke lubang eks batubara PT Graha Benua Etam yang tidak direklamasi.

”Proses hukum harus berjalan. Perusahaan tambang yang melalaikan kewajiban mereklamasi harus dihukum. Sayangnya, kami melihat kepolisian seakan mengendur karena penyidikan kasus tambang ini berlarut-larut tanpa kepastian,” ujar Merah Johansyah, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Minggu (28/12).

Pada Juli 2011, kasus pertama menimpa tiga anak, Miftahul Jannah, Junaidi, dan Ramadhani, yang tercebur ke lubang tambang Hmyco Coal. Dari sisi hukum pidana, kasus ini mandek. Pemerintah Kota Samarinda hanya memberikan tali asih dan menganggap persoalan hukum selesai.

Itu juga yang terjadi ketika Desember 2011, Eza dan Erma, dua anak berumur 6 tahun, tercebur ke lubang tambang PT Panca Prima Mining. Setahun kemudian, Desember 2012, Maulana Mahendra (11) tercebur ke kolam bekas galian tambang milik warga di Palaran. Proses hukum kasusnya, menurut Merah, tidak berlanjut dan tidak diketahui.

April 2014, Nadia Zaskia Putri (10) tewas tercebur ke lubang tambang yang digarap perusahaan Cahaya Ramadhan, kontraktor dari PT Energi Cahaya Industritama. Keluarga korban mendapat tali asih, tetapi proses hukumnya tidak jelas.

Oleh karena itu, Jatam Kaltim pada 24 April 2013 dan 21 April 2014 mengirim surat mempertanyakan kinerja kepolisian, DPR, hingga Komnas Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sebab, penyelidikan kasus selalu berlarut.

Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail mengakui bahwa jajarannya tidak bisa merampungkan permasalahan tambang. Pemkot Samarinda perlu lembaga superbodi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang langsung bekerja sama dengan Polri.

”Dari 57 perusahaan tambang di Samarinda yang memiliki IUP (izin usaha pertambangan), sudah empat yang IUP-nya kami cabut dalam 1,5 tahun terakhir. Frekuensi teguran dan desakan, hingga inspeksi mendadak, tak terhitung lagi. Tapi, mereka (perusahaan tambang) tidak menghiraukan Pemkot,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Polres Samarinda Komisaris Besar Antonius Wisnu Sutirta menegaskan, setiap kasus yang menyebabkan nyawa seseorang melayang akan diselidiki serius. **(PRA)**